

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI KOTA
BINJAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Malia Humaira,¹ Maryam Batubara,² Muhammad Yusuf³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Email : maliahmra@gmail.com

Abstract

This research examines the government's efforts in tackling unemployment in Binjai City from a sharia economic perspective. The importance of this research stems from the fact that there are still many people who are unemployed, coupled with the presence of covid-19, which makes people who work partly laid off and it is difficult to find work due to the lack of available job vacancies in Binjai City. It is hoped that the efforts of the Binjai City government can overcome unemployment with various programs, capital, coaching, and training. If the problem of overcoming unemployment is not optimal, it will have an impact on increasing the number of poverty and reducing people's welfare. This research uses a qualitative approach with a phenomenological approach. The data used in this study using purposive sampling technique. Informants in this study were divided into three, namely: key informants, main informants, and supporting informants. In this article, data collection techniques such as interviews and observations were used to generate raw data, which were then processed using interactive model qualitative data analysis techniques to ensure their validity. The results of the study indicate that the efforts made by the government of Binjai City have not been maximized, but are sufficient to reduce the existing unemployment, although not significantly. Some of the abilities gained from the training are in line with the training held and some are not, but they are able to open new businesses. Sharia economics leads to the concept of al-Falah (glory) in this world and the hereafter, the Binjai City government realizes the importance of falah. The government always tries to manage existing resources to achieve falah, where the government acts as a facilitator even though it is not based on the principles of the values of the Qur'an and Sunnah, but the government has succeeded in overcoming unemployment with the provisions stipulated in the Act. RI Number 13 of 2003 concerning Manpower, the 1945 Constitution Article 27 paragraph 2, Binjai City Regional Regulation Number 1 of 2008 concerning Manpower.

Keywords: government efforts, unemployment, sharia economics

1. PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara pada Agustus 2020 mencapai 6,91% meningkat 1,50 poin dibandingkan Agustus 2019. Survey penduduk pada data Badan Pusat Statistik Kota Binjai menunjukkan bahwa penduduk Kota Binjai pada tahun 2011 berjumlah 247.111 jiwa dan pada tahun 2015 berjumlah 264.687 jiwa, jumlah penduduk meningkat sebesar 3,43%.

Otomatis jumlah penduduk di Kota Binjai akan meningkatkan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran pada tahun 2015 sebesar 10,00% yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 6,78% dari tahun 2011-2015. Persentase tingkat pengangguran terbanyak terjadi pada tahun 2017-2020, pengangguran meningkat sebesar 18,60%. (<https://sumut.bps.go.id>)

Tabel 1.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(TPAK)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2020

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tingkat Pengangguran Terbuka/ Unemployment Rate		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Labour Force Participation Rate	
	Feb/Feb	Agt/Aug	Feb/Feb	Agt/Aug
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Nias	1,31	3,49	77,36	81,16
02 Mandailing Natal	4,85	6,50	70,81	65,94
03 Tapanuli Selatan	2,28	4,42	74,94	78,54
04 Tapanuli Tengah	6,86	7,54	71,12	70,91
05 Tapanuli Utara	2,91	2,94	83,96	82,18
06 Toba Samosir	1,67	2,50	77,23	81,21
07 Labuhanbatu	6,10	6,05	62,17	64,91
08 Asahan	2,99	7,24	68,33	59,62
09 Simalungun	4,93	4,58	64,48	71,83
10 Dairi	-	1,75	85,96	70,22
11 Karo	0,38	1,83	82,21	83,93
12 Deli Serdang	8,17	9,50	68,23	67,23
13 Langkat	4,47	7,02	65,38	69,92
14 Nias Selatan	2,49	4,15	78,99	77,14
15 Humbang Hasundutan	0,66	0,84	82,77	87,13
16 Pakpak Bharat	0,71	1,93	87,81	88,95
17 Samosir	0,36	1,20	86,88	52,17
18 Serdang Bedagai	5,03	5,54	68,83	69,82
19 Batu Bara	7,52	6,48	67,23	69,10
20 Padang Lawas Utara	0,62	3,11	85,95	66,04
21 Padang Lawas	4,74	4,11	77,90	76,93
22 Labuhanbatu Selatan	2,42	4,90	69,06	60,94
23 Labuhanbatu Utara	6,36	6,82	70,07	68,08
24 Nias Utara	4,53	4,54	71,01	73,71
25 Nias Barat	4,41	1,71	77,61	51,83
71 Sibolga	6,19	8,00	75,23	70,38
72 Tanjungbalai	5,85	6,97	62,68	65,84
73 Pematangsiantar	7,86	11,50	69,37	70,45
74 Tebing Tinggi	5,52	9,98	69,48	69,27
75 Medan	11,39	10,74	66,57	63,62
76 Binjai	5,57	8,67	68,95	65,14
77 Padangsidimpuan	5,41	7,45	74,33	73,24
78 Gunungsitoli	6,47	5,94	64,18	62,82
Sumatera Utara	4,71	6,91	72,17	68,67

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai pada bulan Februari sebesar 5,57%, pada bulan Agustus sebesar 8,67%, Dampak dari Covid-19 menyebabkan pengangguran terbuka Kota Binjai meningkat sebesar 3,1%.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Binjai pada bulan Februari sebesar 68,95%, pada bulan Agustus sebesar 65,14%, menurun sebesar 3,81%.

Tabel 2
Penduduk Kota Binjai Yang Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Menurut Komponen Dampak Covid-19 terhadap Pasar Kerja/Pengurangan Jam Kerja, Agustus 2020

Komponen Pengurangan Jam Kerja	Jumlah Penduduk Yang Bekerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengangguran karena Covid-19	2 003	1 327	3 330
Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19	589	1 184	1 773
Sementara tidak Bekerja karena Covid-19	1 591	278	1 869
Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	14 279	8 601	22 880
Jumlah	18 462	11 390	29 852

Sumber: Sakernas, Agustus 2020

Pengangguran karena Covid-19 sebanyak 3.330 orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1.869 orang dan pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 22.880 orang. Jumlah orang yang terkena dampak Covid-19 terhadap pasar kerja maupun pengurangan jam kerja sebanyak 29.852 orang.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dimana terdiri dari Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja. (<https://bps.go.id/>)

Daerah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini terkhusus pada masyarakat di Kota Binjai.

Tabel 3
Penduduk Kota Binjai Menurut Komposisi Penduduk dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Komposisi Penduduk	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Usia Kerja	106 284	107 796	214 080
A. Angkatan Kerja	87 430	52 015	139 445
1. Bekerja	79 698	47 655	127 353
2. Pernah Bekerja	4 262	2 410	6 672
3. Tidak Pernah Bekerja	3 470	1 950	5 420
B. Bukan Angkatan Kerja	18 854	55 781	74 635
1. Sekolah	9 159	9 880	19 039
2. Mengurus Rumah Tangga	3 647	42 384	46 031
3. Lainnya	6 048	3 517	9 565
I. Usia Kerja	33 000	32 222	65 222
<i>Sumber: Sakernas, Agustus 2020</i>			
% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	91,16	91,62	91,33
% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	82,26	48,25	65,14
% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,84	8,38	8,67

Proporsi angkatan kerja Kota Binjai sebanyak 66,86 persen pada tahun 2019 berarti ada sebanyak 66,86 persen penduduk usia kerja yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian Kota Binjai. Dari sebanyak 66,86 persen tersebut, terdapat 4,10 persen diantaranya berstatus pengangguran terbuka. Berarti 4,10 persen angkatan kerja di Kota Binjai masih belum terserap ke dalam dunia kerja, sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kota Binjai

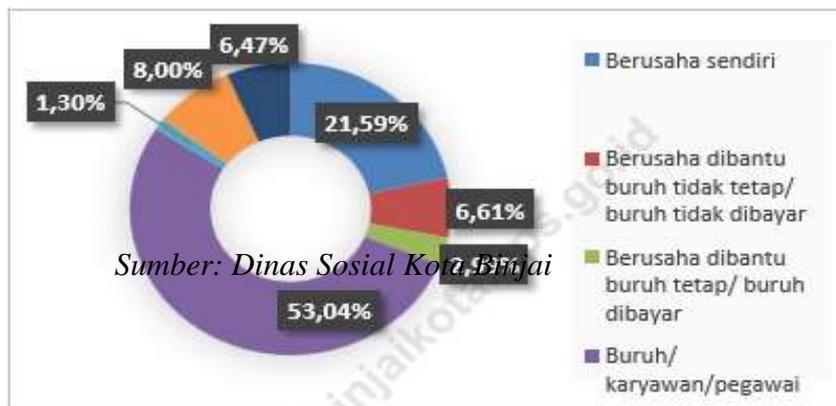
pada 2019 sebesar 66,89 persen. Berarti terdapat sebanyak 66,89 persen penduduk usia kerja di Kota Binjai yang aktif secara ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.. Pada tahun 2019, TPT kota Binjai sebesar 6,14 persen, berarti sebanyak 6,14 persen penduduk usia kerja masih belum terserap di pasar kerja. Dilihat dari lapangan pekerjaannya, dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2019 didapat bahwa mayoritas penduduk Kota Binjai masih bergerak pada sektor jasa. Hal ini dikarenakan Kota Binjai sebagai kota satelit yang berdekatan dengan ibukota provinsi maka lapangan pekerjaan pada sektor jasa terbuka

lebar sehingga banyak penduduk Kota Binjai yang berminat bekerja pada sektor tersebut. Proporsi penduduk yang bekerja pada sektor jasa di Kota Binjai adalah sebanyak 66,78 persen, dengan rincian sebanyak 56,80 persen penduduk laki-laki dan 82,60 persen. (Gusnisa Siswayu, 2019)

Kota Binjai adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Utara yang mulai mengalami perkembangan, perkembangan kota Binjai meliputi aspek ekonomi, fisik, sosial, dan budaya disamping dari pada Kota Medan. Pemerintah kota Binjai dalam visi dan misinya memiliki tujuan untuk memajukan kota Binjai dengan cara pengembangan kewirausahaan dengan mengajak masyarakat untuk memulai usaha-usaha yang produktif baik itu disektor Usaha Kecil Menengah (UMKM). Ada sekitar 700 pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Binjai yang terus bergerak dan melakukan inovasi sehingga membutuhkan peningkatan kualitas melalui berbagai pelatihan. Saat ini perkembangan UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) berjalan dengan baik, tercatat

sebanyak kurang lebih 700 pelaku UMKM dan IKM yang ada di Binjai. UMKM terus bergerak dan berinovasi, sehingga membutuhkan peningkatan kualitas. Agar para pelaku usaha mampu bersaing dengan UMKM dari daerah lain dan negara lain. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM yakni dengan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha. Kemudian perlunya pembinaan dari segi kualitas, pelatihan mengemas hasil produksi, sehingga para pelaku usaha siap untuk bersaing. Yang tidak kalah pentingnya pemerintah juga harus mampu menciptakan pasar, agar produk yang dihasilkan dapat terjual. Saat ini Pemerintah Kota Binjai juga telah menyiapkan satu kolaborasi untuk peningkatan UMKM dan IKM, dengan melakukan kerjasama dengan Buka Lapak, PT Bank Sumut dan Bank Indonesia. (www.sumutantarnews.com)

Belum adanya data berupa bantuan dana permodalan, pelatihan, maupun bantuan lainnya untuk menanggulangi pengangguran di Kota Binjai.



Gambar 1.

Persentase Penduduk Kota Binjai Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Agustus 2020

Berdasarkan gambar 1.1 penduduk Kota Binjai berumur 15 tahun ke atas yang bekerja berusaha sendiri tanpa bantuan pemerintah sebesar 21,59%. Persentase ini lebih besar daripada yang dibantu sebesar 9,6%.

Diharapkan upaya pemerintah Kota Binjai dapat menanggulangi pengangguran dengan berbagai program, permodalan, pembinaan, dan pelatihan. Jika penanggulangan masalah pengangguran tidak optimal, maka

akan berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, maka masalah pengangguran harus segera dituntaskan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi

pengangguran di Kota Binjai ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah.

KAJIAN LITERATUR

1. Peran Pemerintah

Pengertian Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Veitzal Rivai, peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. (Veitzal Rivai, 2004)

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Mudrajad Kuncoro menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator. (Mudrajad Kuncoro, 2004)

Peran pemerintah yang dikemukakan oleh Siagian, pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan, Peran yang disoroti adalah selaku stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana suatu kegiatan pembangunan tertentu. Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapatkan imbuhan awalan "Pe" menjadi kata pemerintah yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara. (Siagian, 2000)

Inu Kencana Syafie, juga berpendapat bahwa pemerintah bisa sebagai ilmu, pemerintah sebagai seni dan pemerintah sebagai moral. (Inu Kencana, 2003)

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, "Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan". (Moh. Kusnardi, 2008)

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan tersebut, maka peran Pemerintah adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah di mana pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Indikator peran Pemerintah pada

penelitian ini adalah sebagai inovator, pelaksana sendiri, dan fasilitator.

2. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam golongan angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Pengangguran (*unemployment*) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara berkembang akan tetapi juga dialami oleh negara maju dan terkhusus pada Kota Binjai. Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran, pengangguran pada prinsipnya mengandung arti melemahnya pertumbuhan produk dan adanya kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan menyebabkan pemborosan sumber daya manusia, disamping memperkecil pertumbuhan produk, pengangguran juga mengacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi, hal ini terutama terjadi pada negara maju dan pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan tunjangan bagi para penganggur. (Muana Nanga, 2005)

Salah satu penyebab timbulnya pengangguran dalam suatu negara adalah bertambahnya jumlah penduduk, mutu, baik kualitas maupun kuantitas penduduk suatu negeri merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standar hidup suatu negara. Hal ini disebabkan karena penduduk merupakan sumber tenaga kerja dan disamping itu faktor produksi skill. (Suherman Rosyidi, 2003)

Tujuan dari penambahan lapangan kerja adalah untuk meningkatkan kondisi rakyat miskin yang terhambat dengan adanya problem pengangguran dalam suatu masyarakat.

a. Jenis-Jenis Pengangguran

Berdasarkan pada ciri pengangguran yang berlaku pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut yaitu:

- 1) Pengangguran Terbuka
- 2) Pengangguran Tersembunyi
- 3) Pengangguran Bermusim

4) Setengah Menganggur

b. Penyebab Pengangguran

Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran:(Suherman Rosyidi, 2016)

- 1) Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja.
- 2) Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja.
- 3) Kurangnya informasi, di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memilli kekurangan tenaga pekerja.
- 4) Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
- 5) Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill.
- 6) Budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

Menurut Sukirno sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan kepada tiga jenis yaitu:(Sadono Sukirno, 2006)

- 1) Pengangguran friksional adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh.
- 2) Pengangguran struktural, terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.
- 3) Pangangguran teknologi, ditimbulkan oleh adanya pengantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi.

c. Dampak Pengangguran

Menurut Riska Franita terdapat beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran:(Riska Franita, 2016)

- 1) Ditinjau dari segi Ekonomi Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapat ekonomi mereka. sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat meandiri dalam menghasilkan finansial

untuk kebutuhan hidup para pengangguran.

- 2) Ditinjau dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri,merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kehidupan mereka.
- 3) Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguranmaka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi.
- 4) Ditinjau dari segi politik maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi. Yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demosntrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.
- 5) Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran membuat para pengangur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan.
- 6) Banyaknya pengangguran juga dapat meningkatkan Pekerja Seks komersial dikalangan muda, karena demi menghidupi ekonominya.
- 7) Banyaknya dampak pengangguran yang timbul, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap daerah harus mampu mandiri dalam meningkat laju perekonomiannya.

Dalam penelitian ini pengangguran akan dikaji melalui indikator tingkat pengangguran terbuka, yaitu tingkat angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis pengangguran di Kota Binjai berdasarkan penyebabnya adalah pengangguran friksional dan berdasarkan lamanya bekerja adalah pengangguran terbuka.

d. Kebijakan untuk Menekan Angka Pengangguran

Untuk mengurangi angka pengangguran Pemerintah dapat melakukan beberapa cara antara lain adalah: 1) Memperbanyak Proyek Magang Bagi Calon Tenaga Kerja, 2) Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja, 3) Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas Bagi Rakyat, 4) Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, 5) Mengembangkan Sektor Informal, 6) Program Transmigrasi, 7) Peningkatan Investasi.

Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah membawa kepada konsep al-Falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, Ekonomi Syariah meletakkan manusia sebagai Khalifah di bumi di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit diperuntukkan untuk manusia, mencari ridha Allah merupakan faktor utama dalam melakukan aktivitas ekonomi, karena pengaruh keyakinan yang kuat akan kehadiran Allah, dan ide-ide yang kuat antara lain yakni kesejajaran manusia dihadapan Allah tentang orang miskin memiliki hak atas kekayaan orang kaya, tentang kewajiban orang kaya untuk membelanjakan kekayaannya secara sederhana karena mereka bukan pemilik melainkan penerimaamanat atas kekayaan itu, pada dasarnya manusia merupakan pelaku yang bebas dan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. (Nawab Haider Navqi, 2003)

Teori Ekonomi Syariah megemukakan bahwa etika perekonomian suatu Negara dilanda kekacauan dengan sebab-sebab sebelumnya yang kebanyakan menyimpang dari Syariat Islam, maka manusia sebagai khalifah Allah di bumi harus menyadari bahwa segala hal yang ada di bumi adalah amanah bagi manusia agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Dalam sistem kenegaraan yang menerapkan Syariah Islam, mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah atau Kalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu: mekanisme individu dan sosial ekonomi.

1) Mekanisme Individu

Dalam mekanisme ini Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan.

Firman Allah Swt. dalam QS al-Mulk ayat 15 yang artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjuru-Nya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*. (Departemen Agama RI, 2002)

2) Mekanisme Sosial Ekonomi

Mekanisme ini dilakukan oleh Khalifah melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran.

- a) Negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor real baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.
- b) Negara menyediakan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
- c) Negara harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara adil.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu berusaha mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya yang berupaya untuk memahami atau menafsirkan fenomena yang dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya. (Norman K. Denzin, 2009)

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berusaha menggambarkan dan mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukannya, di mana dan bagaimana melakukannya. (Jogianto H.M, 2009)

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi di mana peneliti bertindak sebagai instrumen pertama, maksudnya disamping sebagai pengumpul data dan penganalisa data peneliti juga terlibat langsung dalam proses penelitian. (Christine, 2001)

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan adalah orang yang akan diwawancarai dan diminta informasi darinya untuk mendukung penelitian ini. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Informan kunci: Kepala Bidang Ketenagakerjaan.
- 2) Informan utama: Kepala Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Perdagangan dan Walikota Binjai.
- 3) Informan pendukung: dan masyarakat yang menganggur yang mengikuti pelatihan selama pandemi covid-19.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini

adalah data yang diperoleh dari pelaksanaan observasi, wawancara, dan data-data mengenai informan. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Kota Binjai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2008 tentang Ketenagakerjaan, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

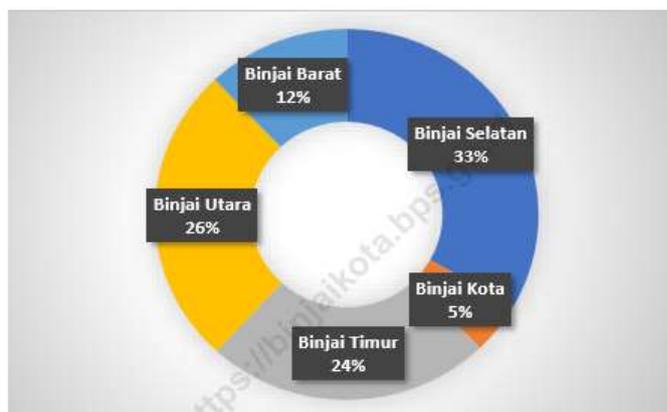
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung. (Iskandar, 2009).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Binjai

1. Profil Kota Binjai

Posisi Kota Binjai cukup strategis untuk menjadikannya berkembang pesat sebagai Kota perdagangan karena terletak di jalur lintas Sumatera. Jalur ini menghubungkan Kota Binjai dengan Kota atau kabupaten di Sumatera Utara, seperti Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021

Gambar 2
Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2020

Selain dikenal sebagai Kota dagang, Binjai juga dikenal sebagai Kota penghasil rambutan. Luas areal perkebunan rambutan di Kota Binjai saat ini mencapai 425 Ha dengan jumlah produksi sekitar 2.400 ton per tahun. Selain sebagai buah segar, buah rambutan juga diolah menjadi selai atau buah kaleng.

2. Orientasi Wilayah

Secara geografis wilayah Kota Binjai berada antara 3° 31' 40" - 3° 40' 2" Lintang

Utara dan 98° 27' 3" – 98° 32' 32" Lintang Selatan dengan luas wilayah 90,23 km².

3. Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kota Binjai tahun 2020 sebanyak 279.302 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin pada gambar 4.3. (<https://binjaikota.bps.go.id/>, 2021)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2021

Gambar 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kepadatan penduduk di Kota Binjai tahun 2020 mencapai 3.095 jiwa/km². Penduduk tertinggi berada di Kecamatan Binjai Kota sebesar 6.710 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Binjai Selatan sebesar 1.932 jiwa/km². Jumlah rumah tangga sebesar 64.677 rumah tangga. (<https://binjaikota.bps.go.id/>, 2021)

4. Tenaga Kerja

Penduduk Kota Binjai yang merupakan angkatan kerja, sebagian besar adalah laki-laki yang bekerja, sebanyak 57.128 orang. Sedangkan sebagian besar penduduk Kota Binjai yang perempuan bukan angkatan kerja mempunyai kegiatan mengurus rumah, yaitu sebanyak 28.269 orang. Nilai ini hampir sebanding dengan jumlah penduduk perempuan Kota Binjai yang bekerja, yaitu sebanyak 28.784 orang. Pada tahun 2020, terdapat 326 orang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Dari total pencari kerja tersebut, sebesar 53 persennya adalah perempuan. (<https://binjaikota.bps.go.id/>, 2021)

5. Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

a. Visi

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Wali Kota terpilih. Berikut Visi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, “*Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera*”.

b. Misi

Misi pertama, Mewujudkan Pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Misi kedua, Meningkatkan

perekonomian Kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif, dan produktif (*Smart Economy* dan *Smart Environment*). Misi ketiga, Meningkatkan kualitas standart hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan, dan kenyamanan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

c. Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, yaitu: 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik, 2) Mendorong tumbuhnya industri yang berdaya saing maju melalui peningkatan industri kreatif, 3) Mendorong tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa, 4) Meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja dengan menumbuhkan jiwa wirausaha serta perlindungan tenaga kerja, 5) Meningkatkan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

B. Pembahasan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari Bab XVIII dan Pasal 193 dimana dijelaskan bahwa “pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang jabatan atau pekerjaan”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai bahwa mereka memiliki peran untuk menanggulangi pengangguran yaitu: dengan menciptakan tenaga kerja yang professional sesuai kebutuhan pasar dan terampil, serta menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjadi fasilitator untuk memberikan informasi

pekerjaan bagi para pencari kerja. Seperti yang dikatakan oleh Ibu RS selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan: “Perannya sangat strategis dalam menanggulangi pengangguran, karena bisa membantu masyarakat untuk mengurangi pengangguran, karena dengan menanggulangi pengangguran yang ada sekarang ini otomatis pengangguran bisa berkurang”.

Untuk terciptanya tenaga kerja yang professional serta terampil, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai tugas untuk melatih masyarakat yang tidak punya keahlian menjadi masyarakat yang berkeahlian. Dengan memberikan pelatihan dan keterampilan ini agar dapat membentuk skill atau keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja sesuai yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau perusahaan, serta membantu menyerap jumlah pengangguran, dan juga agar para pencari kerja bisa mandiri dalam mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Berikut adalah Kutipan wawancara dengan Ibu RS selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan: “Maksudnya berkeahlian disini adalah keahlian bekerja. Target Dinas Tenaga Kerja adalah masyarakat pengangguran seperti: anak-anak yang baru tamat sekolah SMA/SMK, Ibu Rumah Tangga, maupun masyarakat yang minim pengetahuan tentang dunia kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai merangkul masyarakat yang pengangguran untuk dilatih dan diberi ilmu untuk menjadi pekerja-pekerja yang professional dan berkompeten dalam bidangnya”.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mengadakan Pelatihan-Pelatihan keterampilan kerja didalam lingkup Dinas maupun yang dilakukan diluar lingkup Dinas (Di Kelurahan maupun Kecamatan) didalam lingkup Dinas ada beberapa Program Pelatihan kerja yang dilaksanakan seperti program-program Pelatihan. Pelatihan tersebut terdiri dari Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional, Teknisi Refrigrasi, Menjahit Komponen Pakaian, Teknisi Audio, Teknik Manufaktur, Salon (Barbershop). Seperti yang disampaikan oleh Ibu RS selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan: “Kami memberikan banyak pelatihan, contohnya di bidang otomotif kami

mengadakan service sepeda motor, di bidang salon kami mengadakan pelatihan gunting rambut, di bidang pakaian kami mengadakan pelatihan menjahit pakaian, di bidang tata boga kami mengadakan pelatihan masak-memasak. Dengan mengadakan pelatihan- pelatihan ini secara terus menerus pastinya akan menghasilkan tenaga kerja yang professional dan terampil. Para tenaga kerja ini otomatis bisa menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha- usaha baru sehingga bisa banyak memberikan peluang bagi para pencari kerja atau yang sedang menganggur”.

Informasi lowongan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh para pencari kerja, informasi yang banyak bisa memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan sesuai minat yang dimiliki. Mencari informasi lowongan pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknologi dan bersosialisasi dengan berbagai kalangan dapat menambah referensi mengenai pekerjaan yang ingin dicari, oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai telah membuat situs untuk informasi pasar kerja agar bisa memperluas informasi pasar kerja demi meningkatkan produktivitas kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan juga dapat membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu RS selaku Kepala Bidang Ketenagakerjaan: “Kami sebagai fasilitator memberikan informasi melalui Job Vacansing, kami selalu meminta informasi-informasi dari perusahaan swasta kalau ada lowongan pekerjaan, informasi tersebut selalu kami sebarluaskan di internet maupun website resmi kami.”

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk menanggulangi pengangguran sudah cukup baik meskipun belum maksimal, dimana Dinas Tenaga Kerja sudah berusaha agar dapat menerapkan dan melaksanakan semua program-program mereka, sehingga produktivitas dari Dinas Tenaga Kerja cukup meningkat melihat dari beberapa masyarakat yang memberikan tanggapan dengan baik dari usaha-usaha yang dilakukan

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai. Dalam tujuan Ekonomi Syariah, secara khusus yaitu pengurangan pengangguran dan kemiskinan, stabilitas distribusi pendapatan yang merata, serta penyediaan lapangan pekerjaan. Upaya dalam menanggulangi pengangguran ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan manusia dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada, di mana nilai-nilai Syariah berfungsi sebagai filter atas perilaku ekonomi manusia itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai dalam menanggulangi pengangguran yaitu: a) melakukan pelatihan (SKIEE) bagi pengangguran, melalui kerjasama dengan BBPLK Medan, Bandung dan Bekasi, b) menempatkan pencari kerja ke Perusahaan-Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, c) Memberikan stimulus bantuan, baik dana ataupun peralatan untuk pelatihan. Hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah Kota Binjai belum maksimal, namun sudah cukup untuk mengurangi pengangguran yang ada walaupun tidak signifikan. Dilihat dari peserta yang mengikuti pelatihan sampai tahap akhir ternyata mampu mendorong peserta memiliki usaha baru maupun bekerja di perusahaan swasta. Kemampuan yang didapatkan dari pelatihan ada yang sejalan dengan pelatihan yang diadakan dan ada yang tidak sejalan namun mereka mampu membuka usaha baru.
2. Ekonomi Syariah membawa kepada konsep al-Falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, pemerintah Kota Binjai menyadari pentingnya falah. Pemerintah selalu berusaha mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai falah, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator walaupun tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai al-Qur'an dan Sunnah, tetapi Pemerintah

berhasil menanggulangi pengangguran yang ada dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2008 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pandangan Islam suatu daerah akan lebih baik kalau ada penekanan pada pembagian kerja untuk mengarah pada satu tujuan bersama: yaitu kesejahteraan dunia akhirat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai hendaknya menjadi program yang terdesain dengan jitu dan terukur dengan mudah, sehingga akan mulus pula keberhasilannya.

3. Upaya dalam menanggulangi pengangguran ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang ada di Binjai yang berhubungan dengan kebutuhan manusia dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada, di mana nilai-nilai Syariah berfungsi sebagai filter atas perilaku ekonomi manusia itu sendiri.

5. REFRENSI

- Antonio, Muhammad Syafi'i.(2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, . (I). Jakarta: Gema Insani Press.
- Christine dan Dayamon.(2001)*Riset Kualitatif*.,Yogyakarta: Bentang Pustaka. .
- Departemen Agama RI.(2002) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Franita, Riska. (2016) *Analisa Pengangguran di Indonesia*. Jurnal, (1).
- Gusnisa Siswayu (2020) *Profil Kemiskinan Kota Binjai 2019*. Binjai: BPS Kota Binjai.
- Iskandar.(2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Mankiw, Gregory N. (2003) *Teori Makro Ekonomi* (Imam Nurmawan. Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Nanga, Muana. (2001) *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Navqi, Nawab Haider. (2003) *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln(2009).*Hand Book Of Qualitative Reasearch*, Terj. Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, Veitzal.(2004) *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Cet Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyidi, Suherman. (2003) *Pengantar Teori Ekonomi*, Cet (VII). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono(2006) *Makro Ekonomi Teori dan Pengantar*, cet. (XV). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana.(2003) *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.